KEBIJAKAN KEAMANAN ENERGI TIONGKOK (STUDI KASUS: EKSPANSI CHINA NATIONAL PETROLEUM CORPORATION (CNPC) DI KAZAKHSTAN TAHUN 1997-2011)

Fauziah Heiryah Afiff 44312004, Hubungan Internasional Unikom

Penelitian ini berupaya untuk menganalisis strategi keamanan energi Tiongkok dalam memenuhi kebutuhan domestiknya. Pertumbuhan ekonomi yang pesat membuat konsumsi energy khususnya minyak bumi negara ini semakin meningkat. Akan tetapi hal ini tidak diikuti dengan kemampuan Tiongkok untuk memenuhi konsumsi minyak bumi secara mandiri dan membuat negara ini memiliki ketergantungan yang tinggi akan impor minyak bumi. Oleh karena itu dalam tulisan ini penulis akan menganalisis kebijakan keamanan energi yang di keluarkan oleh Tiongkok melalui badan perusahaan minyak milik Tiongkok yaitu *China National Petroleum Corporation (CNPC)* untuk menjamin ketersediaan suplai energinya agar perekonomian Tiongkok dapat terus berjalan dengan lancer.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Data dikumpulkan dengan melakukan wawancara dan studi literature serta penelusuran *website*.

Hasil penelitian ini menunjukan ketiga kebijakan yang dikeluarkan oleh Tiongkok telah berhasil dilakukan terbukti dengan terkecukupinya energi Tiongkok saat ini, kemudian Kazakhstan pun mendapatkan kepentingan nasionalnya dari Tiongkok yaitu dengan memberikan fasilitas kesejahteraan bagi masyarakatnya. Dengan hasil *win-win situation.*

Kata kunci: Kebijakan Keamanan Energi, Ekspansi CNPC, Kazakhstan

ABSTRACT

The Energy Security Policy Of China (Case Study : The Expansion of China National Petroleumcorporation (CNPC) In Kazakhstan 1997-2011)

This research attemps to analyze China's energy security strategy to meet its domestic needs. Rapid economic growth has increased China's energy consumption. However, this is not followed by China's ability to meet its petroleum consumption indnpendency. And it makes the country being depended on oil import. Therefore, in this thesis the authors will analyze energy security policy issued by China through agency owned oil companies of China, namely China National Petroleum Corporation (CNPC) to ensure the availability of supply energy that china's economy able to continue current premises.

The method used is qualitative method. The data collection incorporates interviews and literature study both offline and online.

These results indicate a third policies issued by China's has been successfully conducted, as evidenced by fulfilled China's energy, then Kazakhstan also get national interests of China is to provide welfare facilities for the people. With a win-win situation.

Keywords: *Energy Security Policy, CNPC Expansion, Kazakh*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Energi merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi untuk kelangsungan perekonomian suatu negara. Tanpa energi, suatu negara akan menemui hambatan dalam menjalankan kegiatan industri yang pada akhirnya dapat menghambat perekonomian suatu negara. Usaha manusia untuk menghindari semakin langkanya sumber daya energi telah banyak dilakukan. Sumber energi tersebut diperkirakan akan habis dengan cepat karena dipengaruhi oleh laju pertumbuhan penduduk dunia yang meningkat pesat yang berpengaruh pada meningkatnya kebutuhan dan konsumsi energi dunia sehingga makin lama energi tersebut akan habis. Dan energi merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan bagi tercapainya sasaran

pembangunan negara. Karena meningkatnya permintaan terhadap energi dapat berimbas pada perekonomian global yang tumbuh cepat. Pertumbuhan perekonomian berdampak pada peningkatan konsumsi energi yang digunakan untuk proses industri. Energi yang dimaksud adalah minyak mentah, gas, dan batu bara. Sumber energi tersebut merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (*non-renewable*). Oleh karena itu tentu ketersediaannya terbatas dan harga yang terus melonjak naik. Energi tersebut juga diperlukan bagi setiap Negara, sehingga setiap Negara berusaha untuk memperoleh energi ini. Dari sinilah muncul berbagai upaya dari setiap Negara untuk menjamin ketersediaan dan keamanan pasokan energi yang sangat penting tersebut. Untuk mendapatkan jaminan atas ketersediaan dan keamanan pasokan energi, suatu Negara dapat memilih bertindak bersahabat dengan bekerjasama melalui hubungan bilateral.

Dalam hal ini meningkatnya perekonomian Tiongkok menyebabkan permintaan energi Tiongkok dengan cepat menjadi isu politik internasional, Pertumbuhan ekonomi di Tiongkok pada tahun 1991-1997 mencapai 11,4 %, pertumbuhan ini disertai peningkatan konsumsi minyak sebesar 44,7% konsumsi minyak dari 1959 ribu barrel perhari menjadi 3543 ribu barrel perhari, sementara itu, prooduksi mnyak domestik hanya meningkat sebesar 20,47% dari 2423 ribu barrel perhari menjadi 3047 ribu barrel perhari. Pada 2001-2010, peningkatan produksi minyak hanya 15,93% dari 3047 ribu barrel perhari menjadi 3624,5 ribu barrel sedangkan konsumsi minyak meningkat sebesar 48,38% dari 3543 ribu barrel perhari menjadi 6864 ribu barrel perhari (Henry Wang, 1999: 5). Perbedaan antara produksi dan konsumsi minyak semakin besar di tahun 2001-2010, karena lonjakan impor minyak Tiongkok secara tiba-tiba di tahun 2004 dan perusahaan minyak Tiongkok berusaha untuk memperoleh aset-aset minyak asing dari negara lain, hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan akan terancam jika pasokan energi mengalami kekurangan. Pemerintah Tiongkok pun menyadari bahwasanya energi merupakan isu-isu strategis yang penting kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi Tiongkok, stabilitas sosial, dan keamanan nasional, peningkatan konsumsi energi Tiongkok yang begitu pesat ini didorong oleh cepatnya pertumbuhan ekonomi, pesatnya pertumbuhan industrialisasi, tingginya angka urbanisasi, dan pertumbuhan ekspor (Yi-Chong, 2007: 268).

Sejak meningkatnya permintaan energi Tiongkok yang didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang cepat, terutama industri ekspor, perekonomian Tiongkok telah menjadi bagian yang penting dari perekonomian global. Tiongkok berpotensi mengalami krisis energi karena produksi energi domestik tidak mampu mencukupi kebutuhan industri dan kebutuhan sehari-hari masyarakatnya yang kemudian dapat menghambat pertumbuhan ekonomi di kemudian hari (Safril, 2011: 169). Peningkatan jumlah konsumsi energi di Tiongkok tidak diikuti dengan signifikansi peningkatan produksi sehingga hal ini memaksa Tiongkok berpindah posisi yang awalnya pada tahun 1980an menjadi eksportir minyak terbesar di Asia Timur, menjadi importir minyak terbesar kedua di dunia pada tahun 2004 (Safril, 2011: 171-172). Dalam hal ini penambahan volume produksi minyak di Tiongkok dapat dilakukan dengan mendatangkan suplai dari luar Tiongkok.

B. Rumusan Masalah

1. Rumusan Masalah Mayor

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

"Bagaimana Kebijakan Keamanan Energi Tiongkok Melalui Ekspansi CNPC Di Kazakhstan Terkait Dengan Suplai Energi Minyak Di Tiongkok Pada Tahun 1997-2011?"

2. Rumusan Masalah Minor

1) Apakah arti penting Kazakhstan bagi Tiongkok dalam suplai energi minyak di Tiongkok?
2) Bagaimana Ekspansi CNPC di Kazakhstan berdasarkan 3 kebijakan keamanan energi yang dikeluarkan oleh Tiongkok?
3) Bagaimana dampak Ekspansi CNPC di Kazakhstan bagi

kebutuhan energi minyak Tiongkok?

3. Pembatasan masalah

Dalam memfokuskan lingkup kajian penelitian, dan lebih memudahkan penelitian ini, peneliti membatasi masalah berdasarkan ketika CNPC mulai memasuki sektor minyak Kazakhstan dengan membeli 60.7% saham Aktobemunaigaz pada 1997. Jangkauan penelitian ini berakhir pada tahun 2011, ditandai dengan pencapaian terakhir CNPC dalam peresmian jalur pipa minyak sepanjang 3000 km yang menghubungkan Atasu (Kazakhstan) dan Alashankou (Tiongkok).

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti Kebijakan Keamanan Energi Tiongkok Melalui Ekspansi CNPC Di Kazakhstan Terkait Dengan Suplai Energi Minyak di Tiongkok. Pada Tahun 1997-2011.

2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan, antara lain:

a. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisa arti penting Kazakhstan bagi Tiongkok terkait suplai keamanan energi minyak di Tiongkok.
b. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisa bagaimana ekspansi CNPC di Kazakhstan Berdasarkan 3 kebijakan keamanan energi yaitu, kebijakan *Going Out*, kebijakan *Loan For Oil*, dan kebijakan *Transnational Oil Pipeline*.
c. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisa dampak apa saja dari kebijakan keamanan energi yang dikeluarkan oleh Tiongkok terhadap kebutuhan energi minyak Tiongkok.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pada maksud dan tujuan serta latar belakang yang terdapat pada penelitian ini, maka peneliti mengkatagorikan kegunaan penelitian ini menjadi dua bagian, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan Teoritis bagi pihak yang terkait dengan penelitian ini, Agar dapat mengembangkan pengetahuan mengenai kebijakan keamanan energi Tiongkok melalui ekspansi CNPC Di Kazakhstan Terkait Dengan Suplai Energi Minyak di Tiongkok Pada Tahun 1997-2011. Sehingga dapat memberikan informasi secara tepat, akurat dan relevan mengenai penelitian tersebut.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan peraktis dari hasil penelitian ini, di harapkan dapat menjadi bahan untuk menambah wawasan, pengetahuan dan juga informasi bagi :

a. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan,dapat memberikan sutu karya peneliti baru yang dapat mendukung dalam perkembangan ilmu pengetahuan
b. Bagi peneliti agar dapat menambah wawasan dengan ilmu yang telah diperoleh secara teori di penelitian ini
c. Bagi peneliti lain agar dapat dijadikan sebagai acuan terhadap pengembangan ataupun pembuatan dalam penelitian yang sama
d. Bagi perguruan tinggi, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dokumen akademik yang berguna untuk dijadikan acuan bagi sivitas akademika

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Tinjauan Pustaka

1. Hubungan Internasional

Hubungan internasional berawal dari kontak dan interaksi di antara negara-negara di dunia, terutama dalam masalah politik. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, isu-isu internasional ini mengalami banyak perkembangan. negara ataupun aktor non-negara mulai menunjukkan ketertarikannya akan isu-isu internasional di luar isu politik, seperti isu

ekonomi, lingkungan hidup, sosial dan kebudayaan.

Hubungan internasional bersifat sangat kompleks serta interdisipliner, karena di dalamnya terdapat bermacam-macam bangsa yang memiliki kedaulatan masing-masing. Sehingga memerlukan mekanisme yang lebih menyeluruh dan rumit daripada hubungan antar kelompok manusia di dalam suatu negara. Namun, pada dasarnya, tujuan utama studi hubungan internasional adalah mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku para aktor negara dan non-negara. Perilaku tersebut bisa berwujud perang, konflik, kerjasama, pembentukan aliansi, interaksi dalam organisasi internasional dan sebagainya.

Hubungan internasional adalah kunci utama negara atau dasar-dasar negara sebagai dari salah satu bagian dari interaksi negara-negara dalam dunia internasional, dimana negara sebagai aktor utama. Menurut Robert Jackson & George Sorenson mengemukakan bahwa:

> "Alasan utama mengapa kita harus mempelajari hubungan interasional adalah adanya fakta bahwa seluruh penduduk dunia terbagi kedalam wilayah komunitas politik yang terpisah, atau negaranegara merdeka, yang sangat mempengaruhi cara hidup manusia. Secara bersama-sama negara-negara tersebut membentuk sistem internasional yang akhirnya menjadi sistem global" (Jackson & Sorenson, 2005: 3).

Dari pemaparan tersebut bisa disimpulkan bahwa hubungan internasional merupakan suatu kebutuhan yang harus di pelajari dan dipahami, karena kebutuhannya sangatlah komplek pada dewasa ini dengan frekuensi yang tinggi. Menurut Holsti yang dikutip oleh T. May Rudy menyatakan bahwa:

> "Pola interaksi Hubungan Internasional tidak dapat dipisahkan dengan segala bentuk interaksi yang berlangsung dalam pergaulan masyarakat internasional, baik oleh pelaku negara-negara (*state-actors*) maupun oleh pelaku-pelaku bukan negara (*non-state actors*)" (Rudy, 2003: 2).

Suatu interaksi dilakukan karena adanya saling membutuhkan diantara negara-negara tersebut. Melalui interaksi ini, akan terjalin suatu pola hubungan yaitu hubungan internasional. Pola hubungan atau interaksi tersebut dapat berupa kerjasama, persaingan dan pertentangan. Tentunya dalam berlangsungnya hubungan internasional yang diharapkan adalah berlangsungnya pola-pola kerjasama. Terjadinya hubungan internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdepedensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar.

2. Hubungan Bilateral

Hubungan bilateral dapat berlangsung dalam berbagai konteks yang berbeda. Kebanyakan hubungan dan interaksi yang berbentuk kerjasama terjadi di antara dua pemerintah yang memiliki kepentingan atau menghadapi masalah serupa secara bersamaan. Hubungan ini dilakukan antar negara yang bernaung dalam organisasi dan kelembagaan internasional. Beberapa organisasi seperti PBB menetapkan bahwa kerjasama yang berlangsung di antara negara anggota organisasi tersebut dilakukan atas dasar pengakuan kedaulatan nasional masing-masing negara. Hubungan yang dilakukan antar pemerintah dua negara yang berdaulat dalam rangka mencari penyelesaian bersama terhadap suatu masalah yang menyangkut kedua negara tersebut melalui perundingan, perjanjian dan lain sebagainya disebut sebagai kerjasama bilateral. Hubungan bilateral merupakan suatu bentuk hubungan dua negara yang saling mempengaruhi atau terjadinya hubungan timbal balik yang dimanifestasikan dalam bentuk kooperasi (Perwita & Yani, 2005 : 42).

Menurut Muhammad Iqbal Fadillah dalam tulisannya "Prospek Hubungan Bilateral Indonesia dan Amerika: Membangun Saling Pengertian". Fadillah mengemukakan bahwa :

> "Kerjasama bilateral adalah adalah suatu kerjasama antara dua Negara dalam bidang-bidang tertentu, misalnya kerjasama bilateral Indonesia dengan Malaysia dalam bidang ketenagakerjaan dalam bentuk *Memorandum of Understanding* (MoU). Kerjasama bilateral dua negara juga mempunyai prinsip yang saling menguntungkan, saling menghargai dan saling menghormati satu sama lain dalam langkah pengambilan kebijakan dinegaranya masing-masing (Fadilah, 2005:1)."

Bilateralisme mengacu pada hubungan politik dan budaya yang melibatkan dua negara, contohnya:

1. Penandatanganan atau perjanjian
2. Tukar menukar Duta Besar
3. Kunjungan kenegaraan

3. Kerjasama Internasional

Kerjasama internasional merupakan suatu perwujudan kondisi masyarakat yang saling tergantung satu dengan yang lain. Dalam melakukan kerjasama ini dibutuhkan suatu wadah yang dapat memperlancar kegiatan kerjasama tersebut. tujuan dari kerjasama ini ditentukan oleh persamaan kepentingan dari masing-masing pihak yang terlibat. Kerjasama internasional dapat terbentuk karena kehidupan internasional meliputi bidang, seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan dan keamanan (Perwita & Yani, 2005: 34).

Sejak awal, fokus dari hubungan internasional mempelajari penyebab-penyebab konflik dan kondisi-kondisi yang menciptakan kerjasama-kerjasama yang dapat tercipta sebagai akibat dari adanya penyesuaian-penyesuaian prilaku oleh para aktor dalam rangka merespon dan mengantisipasi pilihan-pilihan yang diambil oleh aktor lainnya.

Menurut T. May Rudy ada 2 (dua) bentuk dan pola kerjasama, yaitu:

1. Kerjasama Pertahanan-Keamanan *(Collective Security)*
2. Kerjasama Fungsional *(Functional Co-operation)* (Rudy, 2009: 8).

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian Kualitatif untuk memberikan penjelasan mengapa sesuatu terjadi yang bermaksud menjelaskan variabel-variabel seperti *state-centric*, sistem energi global, investasi, kerjasama (dalam hal ini pemerintah Tiongkok dan Kazakhstan) dan hubungannya satu sama lain dengan tujuan menjelaskan bagaimana kebijakan Tiongkok terkait keamanan suplai energi melalui CNPC di Kazakhstan. Dengan desain penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan yang cukup dalam penyusunan desain dan pelaksanaan kajian lanjutan yang lebih sistematis.

B. Informan Penelitian

Untuk dapat melakukan penelitian ini dilakukan wawancara, pengamatan atau penelaahan dokumen. Maka dari itu, saya selaku peneliti akan melakukan wawancara untuk mendapatkan data yang akurat kepada beberapa orang yang ahli di bidang keamanan dalam kerjasama antar negara. Saya juga akan melakukan penelitian kepada perwakilan Negara yang bersangkutan. Wawancara tersebut dimaksudkan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai kebijakan keamanan suplai energi yang dilakukan Kazakhstan kepada Tiongkok melalui CNPC pada tahun 1997-2011.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data primer (data yang diperoleh langsung dari sumbernya) dan data sekunder (data yang diperoleh tidak langsung dari sumbernya) adalah melalui Studi Kepustakaan dengan teknik pengumpulan data sekunder dari berbagai buku, dokumen dan tulisan yang relevan untuk menyusun konsep penelitian serta mengungkap obyek penelitian. Penelitian dilakukan dengan banyak melakukan telaah dan pengutipan berbagai teori yang relevan utuk menyusun konsep penelitian. Pendukung dari media internet serta media cetak seperti surat kabar, majalah dan sebagainya. Studi kepustakaan juga dilakukan untuk menggali berbagai informasi dan data faktual yang terkait atau merepresentasikan

masalah-masalah yang dijadikan obyek penelitian. Peneliti juga menggunakan Teknik pengumpulan data berupa Teknik Wawancara untuk pengumpulan data primer dari para pihak yang dijadikan informan penelitian.

D. Uji Keabsahan Data

Dalam melakukan uji keabsahan data peneliti menggunakan metode triangulasi data dengan cara melakukan konfirmasi data yang diperoleh ke lembaga yang bersangkutan yaitu Kementrian luar negeri Tiongkok dan Kementrian Luar Negeri Kazakhstan. Dengan melakukan studi lapangan ke lembaga tersebut, peneliti juga melakukan wawancara dengan staf kementrian luar negeri Tiongkok untuk mengkonfirmasi data yang diperoleh.

E. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif karena berupa kasus, artikel yang dimuat dalam media, maupun pernyataan-pernyataan.

F. Rencana Pengumpulan Data

Tabel 3.1 Rencana Pengumpulan Data

no	Data yang dibutuhkan	Teknik Pengumpulan Data	Sumber
1	Kebijakan Keamanan Energi Tiongkok tahun 1997-2011	Studi Pustaka	1. Buku 2. Jurnal 3. Internet
		Wawancara	1. Staf kedutaan Tiongkok
2	Data Kebutuhan Konsumsi Energi Tiongkok	Studi Pustaka	1. Buku 2. Jurnal 3. Internet
		Wawancara	1. Staf kedutaan Tiongkok
3.	Data kerjasama suplai energi Tiongkok-Kazakhstan 1997-2011	Studi Pustaka	1. Buku 2. Jurnal 3. Internet
		Wawancara	1. Staf kedutaan Tiongkok 2. Staf Kedutaan Kazakhstan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Tinjauan Mengenai Kebijakan Keamanan Energi Tiongkok

Pada tahun 1978, pemerintahan Tiongkok dibawah rezim Deng Xiaoping menerapkan kebijakan perekonomian yang lebih liberal daripada pemerintahan sebelumnya, konteks liberal yang dimaksud tidak merujuk pada pengertian Tiongkok menjadi negara kapitalis. Inti kebijakan liberaliasasi ekonomi Deng Xiaoping meliputi dorongan untuk membentuk perusahaan dan bisnis swasta, liberalisasi perdagangan, investasi asing, kelonggaran kontrol negara terkait penetapan harga, investasi dalam produksi industri dan pendidikan tenaga kerja. Kebijakan liberalisasi ekonomi ini sukses meningkatkan rata-rata pertumbuhan ekonomi Tiongkok dari 5.8 % di tahun 1978 menjadi 9.03 % di tahun 1979-1980 dan 9.35% di tahun 1981-1990. (http://www.chinadaily.cn/economic/2009-03/17/content_772272556.htm Diakses pada tanggal 22-07-2016).

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi tersebut, konsumsi energi juga menunjukkan peningkatan, salah satunya konsumsi minyak. Telah diketahui sejak tahun 1978-2010, konsumsi minyak yang menyumbang 19 % dari total konsumsi energi Tiongkok mengalami kenaikan signifikan. Sebagaimana yang ditunjukan oleh tabel dibawah ini.

2. Badan Pembuat Kebijakan Energi Tiongkok

Kebijakan energi Tiongkok dikeluarkan oleh Lembaga kementerian badan energi nasional Tiongkok yaitu NEC *(National Energy Commision)*, pada masa kepemimpinan Jiang Zemin (1993-2003) di mana politik luar negeri Tiongkok semakin meningkatkan intensitas pembangunan perekonomian Tiongkok dengan melakukan interaksi ekonomi secara internasional, yang kemudian di lanjutkan pada masa kepemimpinan Hu Jintao (2003-2013). Kebijakan tersebut menempatkan keamanan energi Tiongkok dalam skenario jangka panjang dalam pasar

energi global, yakni berorientasi mendapatkan lebih banyak impor minyak dari luar.

Sejak tahun 1993 tidak ada otoritas birokrasi yang bertanggung jawab dalam mengelola sektor energi Tiongkok. Baru pada tahun 2005, dibentuk *State Council* yang fungsinya dilengkapi oleh *National Energy Leading Group* sebagai pusat organisasi perumusan kebijakan energi. Akan tetapi struktur ini kemudian dirubah pada tahun 2008 yang *National Energy Leading Group*, dihapuskan sehingga *State Council* kini membawahi langsung organisasi-organisasi sektor energi. *State Council* membawahi 27 kementrian energi dan NDRC *(National Development and Reforms Commission)* yang bertanggung jawab langsung terhadap pengelolaan CNPC. Meskipun terdapat berbagai pendapat, namun keduanya memuat konsekuensi logis yang sama. Seringkali kebijakan yang dihasilkan tidak berjalan sepenuhnya karena badan pembuat kebijakan energi terus berganti dan cenderung berbenturan dengan departemen lain. Tidak adanya kebijakan yang terimplementasi secara penuh mengkibatkan jurang antara pasokan dan permintaan energi semakin besar. Misalnya, defisit terjadi ketika volume konsumsi (aspek permintaan) lebih besar daripada volum produksi minyak (aspek suplai). Adapun, besar perbedaan permintaan dan suplai minyak mencapai 180 juta barrel pertahunnya (http://www.brookings.edu/research/papers/2011/07/Tiongkok-Energi-zhang diakses tanggal 15-06-2016).

3. Kebijakan Keamanan Energi Tiongkok

Pada tahun 1971, embargo ekonomi Amerika Serikat berakhir. Berakhirnya embargo ekonomi menandai peningkatan hubungan internasional Tiongkok. Tiongkok diterima sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa *(United Nations)* pada tahun yang sama. Berakhirnya embargo ekonomi oleh Amerika Serikat serta penerimaan Tiongkok sebagai anggota PBB membuka peluang hubungan internasional yang juga berdampak terhadap perluasan ekonomi. Cadangan batubara dan minyak yang melimpah berpotensi sebagai komoditas ekspor utama dalam meluaskan ekonomi Tiongkok. Cadangan batubara Tiongkok merupakan terbesar ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan Russia. Konsumsi batubaranya menyumbang 77 % total konsumsi energi domestik di tahun 1995 (http://www.brookings.edu/research/papers/2011/07/Tiongkok-Energi-zhang diakses tanggal 15-06-2016). Hal ini membuat Tiongkok tumbuh sebagai negara produksi sekaligus konsumen batubara terbesar di dunia walaupun persoalan lingkungan dan keamanannya menjadi perhatian serius dunia Sesuai dengan tujuan strategis Tiongkok untuk merintis hubungan dengan negara-negara lain. Tiongkok mampu mengalokasikan sumber minyaknya untuk melayani kebutuhan ekspor ke beberapa negara. Misalnya pada tahun 1973 ketika terjadi krisis minyak, Tiongkok mengambil keuntungan dengan mengekspor minyak mentah ke Thailand, Filipina, dan Jepang (Daojiong, 2006: 180).

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Arti Penting Kazakhstan Bagi Tiongkok Dalam Suplai energi minyak di tiongkok

Pemerintah Tiongkok sangat menyadari akan masalah yang dihadapinya, dimana peningkatan kubutuhan bakar bakar industrinya pun semakin meningkat sesuai dengan peningkatan industri, oleh sebab itu demi mempertahankan stabilitas domestiknya, kemudian untuk tujuan jangka panjang dengan berusaha menjadi negara dengan kekuatan terbesar ekonomi di Asia, Tiongkok semakin aktif melakukan kerjasama dengan negara-negara kaya akan minyak bumi.

Semenjak tahun 1993 Tiongkok telah mengalami ketergantungan pada impor minyak mentah yang mengalami pertumbuhan pada setiap tahunnya. Misalnya, Tiongkok mengimpor minyak mentah hanya 1% dari konsumsi minyak harian pada tahun 1993, sedangkan Tiongkok mulai mengimpor 48% dari konsumsi harian pada tahun 2004. Seperti yang telah dilansir pada situs resmi Kementerian Perdagangan Tiongkok, konsumsi minyak Tiongkok akan meningkat dari 346,6 juta ton pada 2006 menjadi 407 juta ton pada 2010. Kebutuhan minyak Tiongkok pada tahun 2020 diperkirakan akan mencapai 563 juta ton atau membengkak menjadi 10,5 juta barel per hari. Menurut data akademi

tersebut dalam laporannya menyebutkan pertumbuhan rata-rata permintaan minyak sekitar 4,5% perhari (http://www.eia.gov/beta/international/analysis.cfm?iso=CHN diakses tanggal 22-08-2016).

Terdapat dua penjelasan utama Tiongkok keuntungan investasi di Kazakhstan. Pertama, keuntungan dari ketidakhadiran militer Amerika Serikat di tersebut yang memungkinkan Tiongkok untuk mengalihkan suplai energi dari jalur laut yang didominasi oleh Angkatan Laut AS ke jalur darat. Kedua, deposit minyak Kazakhstan melimpah dengan konsumsi energi yang masih rendah, tumbuh sebagai negara produsen dan pengekspor di pasar energi global. Di samping itu, Kazakhstan merupakan negara penting dalam sektor energi di Kaspia (http://e-history.kz/en/contents/view/2162 diakses tanggal 20-08-2016).

2. Ekspansi CNPC di Kazakhstan Berdasarkan 3 Kebijakan Keamanan Energi

Ancaman Energi Tiongkok

Kebijakan energi Tiongkok juga dikonstruksi dari berbagai persepsi sumber ancaman kemanan energi Tiongkok. Terdapat tiga analisis yang mewakili persepsi ancaman energi Tiongkok. Pertama, analisis fundamental berdasarkan laporan British Petroleum yang menekankan adanya defisit minyak akibat konsumsi energi di sektor industri. Kedua, analisis eksternal oleh Stein Tonnesson dan Ashild Kolas dan Erica S Downs yang melengkapi ancaman ketidakamanan energi secara komprehensif di luar aspek fundamental. Ketiga, analisis struktural oleh Zha Daojiong yang menyatakan ketidakamanan energi sebagai akibat tidak adanya birokrasi yang secara jangka panjang yang mengelola dan merumuskan kebijakan energi secara lebih terorganisir.

Analisis Ancaman Fundamental

Analisis fundamental menitikberatkan gangguan keamanan Energi pada aspek fundamental yakni *"supply"* dan *"demand"* bergeser dari titik keseimbangan. Analisis ini menggunakan data kuantitatif terkait pertumbuhan ekonomi dan komposisi sumber energi yang mempengaruhi konsumsinya. Salah satu data kuantitatif yang mendukung ialah laporan British Petroleum pada tahun 2003. Laporan British Petroleum berfungsi untuk memperjelas tingkat ketidakamanan energi dengan menunjukkan hubungan antara konsumsi dan pertumbuhan ekonomi terhadap peningkatan permintaan energi dan defisit minyak. Ketidakamanan energi Tiongkok berkaitan erat dengan fakta peningkatan konsumsi minyak. Laporan British Petroleum, menyebutkan adanya defisit minyak Tiongkok. Misalnya, sejak tahun 1993-2002, konsumsi Tiongkok meningkat dari 2.9 juta barel setiap hari menjadi 5.4 juta barel, sementara produksi minyak naik dari 2.9 juta barel setiap hari menjadi 3.4 juta barel pada periode yang sama Peningkatan ini utamanya terjadi pada sektor industri. Sebagian besar sector industri Tiongkok mengkonsumsi minyak lebih banyak daripada sektor lain. Misalnya pada tahun 1995, konsumsi minyak sektor industri mencapai Di tambah pula sektor industri manufaktur semakin memegang peran signifikan dalam perekonomian Tiongkok. Berdasarkan laporan British Petroleum diketahui pertumbuhan di sektor perekonomian juga memicu peningkatan konsumsi industri. (www.bp.com/en/global/corporate/press/speeches/after-a-calm-comes-the-storm.html diakses tanggal 16-06-2016).

Analisis Ancaman Eksternal

Analisis ketidakamanan energi kedua berasal dari laporan yang ditulis oleh Stein Tonnesson dan Ashild Kolas dalam International Peace Research Institute di Oslo Norwegia, menyebutkan sumber ketidakamanan energi, utamanya minyak, terletak pada gangguan eksternal. Gangguan eksternal mencakup persepsi ancaman yang berasal dari sebab-sebab domestik, internasional, dan tingkat ketergantungan pada satu sumber.

Analisis Ancaman Struktural

Analisis struktural terkait persepsi ancaman energi berasal dari tulisan Zha Daojiong. Berseberangan dengan dua analisis sebelumnya, Zha Daojiong Direktur *Center for International Energi Security* di Renmin *University's School of International Studies* di Tiongkok, menolak asumsi-asumsi di atas. Argumen Daojiong didasarkan pada fakta sejarah. Selama dua dekade, tidak ada kendala politis yang menghalangi akses impor minyak Tiongkok selama ini. Ia juga menyebutkan tidak adanya ancaman serius pada jalur transportasi. Walaupun demikian, Zha Daojiong menambahkan bahwa tidak menutup kemungkinan adanya ancaman-ancaman lain yang lebih bersifat struktural. Zha Daojiong berpendapat gangguan struktural berasal tidak adanya dari badan sentral yang menyusun kebijakan energi, tetapi juga terletak pada kebijakan energi itu sendiri. Sejak tahun 1955 hingga 2005, pemerintah Tiongkok beberapa kali mereformasi badan pembuat kebijakan energinya. Proses reformasi ini membawa konsekuensi serius, yakni tumpang tindih otoritas dalam kebijakan energi. Persoalan ini diperparah dengan kekosongan otoritas tunggal yang merencanakan kebijakan energi sejak tahun 1993. Akibatnya, banyak kebijakan energi belum terimplementasi sepenuhnya. Selain itu pada tahun 1950-1980, kondisi politik Tiongkok sedang tidak stabil. Daripada merumuskan kebijakan untuk mengatasi persoalan energi, pemerintah Tiongkok lebih mengedepankan pencapaian stabilitas politik dan sosial sebagai agenda utama (Daojiong, 2006: 45).

Ekspansi di Kazakhstan berdasarkan Kebijakan Going Out

Ekspansi berdasarkan *Going Out Policy* di Kazakhstan ialah akuisisi 60.7 % - 75 % (1997) saham A*ktobemunaigaz* (AMG). Tawaran CNPC yang bernilai US$ 4.3 juta memungkinkan 60.7 % sahamnya jatuh ke Tiongkok. Tawaran ini mengalahkan tawaran perusahaan minyak internasional Russia dan Amerika Serikat dengan janji investasi senilai US$ 3.5 juta untuk pembangunan pipa minyak ke arah timur (dari Aktyrau ke Tiongkok). CNPC yang memperkuat operasi perusahaan dan pengelolaan di kilang minyak Aktobe, menghasilkan peforma lebih baik dan memberi keuntungan investasi lebih besar. Hasilnya, kilang minyak menyumbang sebanyak 120.000 barrel/ hari atau dua kali lipat hasil sebelumnya. Satu bulan kemudian CNPC memenangkan tender di *Uzenmunaigaz* (UMG) (http://www.cnpc.com.cn/en/Kazakhstan/country_index.shtml diakses tanggal 21-07-2016)

Ekspansi di Kazakhstan berdasarkan Kebijakan Loan For Oil (1998-2005)

Kesepakatan dengan pemerintah Kazakhstan di tahun 2003 memberi Tiongkok 50 % saham *Mangistaumunaigaz* (MMG) yang memiliki cadangan minyak sebesar 370 juta barrel per hari bersamaan dengan suntikan dana finansial untuk pembangunan pipa Kazakhstan - Tiongkok sepanjang 3000 km. Kesepakatan serupa juga dilatarbelakangi oleh kebijakan yang sama. Kesepakatan pemerintah Kazakhstan dengan Tiongkok yang mana CNPC dan Bank Ekspor-Impor Tiongkok (*Tiongkok Export-Import Bank*) akan meminjamkan US$ 5 milyar masing-masing untuk *Kazmunaigaz* (KMG) dan Bank Pembangunan Kazakhstan. Pada tahun yang sama yakni bulan Oktober 2003, CNPC membeli 65 % saham *Chevron* di kilang minyak dan gas *North Buzachi*, di Barat Laut Kazakhstan. Pada 2003 CNPC dan *Kazmunaigaz* (KMG)—perusahaan minyak nasional Kazakhstan dan *Kazakh Ministry of Finance's Committee on State Assets and Privatization* menandatangani kesepakatan mengenai ekspansi investasi CNPC di sektor minyak dan gas alam. Pada tahun yang sama yakni bulan Oktober 2003, CNPC membeli 65 % saham *Chevron* di kilang minyak dan gas

North Buzachi, di Barat Laut Kazakhstan. Pembelian ini juga diikuti oleh pembelian saham *Saudi Nimr Petroleum* sebesar 35% pada dua bulan berikutnya. (https://en.tengrinews.kz/politics_sub/Chinese-expansion-in-Kazakhstans-energy-field-258753/ diakses tanggal 22-07-2016)

Ekspansi di Kazakhstan berdasarkan Kebijakan Loan For Oil (1998-2005)

Kesepakatan dengan pemerintah Kazakhstan di tahun 2003 memberi Tiongkok 50 % saham *Mangistaumunaigaz* (MMG) yang memiliki cadangan minyak sebesar 370 juta barrel per hari bersamaan dengan suntikan dana finansial untuk pembangunan pipa Kazakhstan - Tiongkok sepanjang 3000 km. Kesepakatan serupa juga dilatarbelakangi oleh kebijakan yang sama. Kesepakatan pemerintah Kazakhstan dengan Tiongkok yang mana CNPC dan Bank Ekspor-Impor Tiongkok (*Tiongkok Export-Import Bank*) akan meminjamkan US$ 5 milyar masing-masing untuk *Kazmunaigaz* (KMG) dan Bank Pembangunan Kazakhstan. Pada tahun yang sama yakni bulan Oktober 2003, CNPC membeli 65 % saham *Chevron* di kilang minyak dan gas *North Buzachi*, di Barat Laut Kazakhstan. Pada 2003 CNPC dan *Kazmunaigaz* (KMG)—perusahaan minyak nasional Kazakhstan dan *Kazakh Ministry of Finance's Committee on State Assets and Privatization* menandatangani kesepakatan mengenai ekspansi investasi CNPC di sektor minyak dan gas alam. Pada tahun yang sama yakni bulan Oktober 2003, CNPC membeli 65 % saham *Chevron* di kilang minyak dan gas *North Buzachi*, di Barat Laut Kazakhstan. Pembelian ini juga diikuti oleh pembelian saham *Saudi Nimr Petroleum* sebesar 35% pada dua bulan berikutnya. (https://en.tengrinews.kz/politics_sub/Chinese-expansion-in-Kazakhstans-energy-field-258753/ diakses tanggal 22-07-2016)

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kazakhstan muncul sebagai negara baru yang kaya dengan sumber energi, utamanya minyak. Hubungan Kazakhstan dengan negara-negara di sekitarnya dan dunia internasional masih sangat minimal.

Tiongkok melakukan ekspansi dengan menyambut peluang investasi energi di Kazakhstan dengan tawaran lebih baik daripada perusahaan minyak internasional lainnya. Kemenangan tender Tiongkok terhadap perusahaan minyak nasional Kazakhstan mengawali *"Going Out Policy". Going out policy* secara sederhana merupakan kerjasama ekonomi melalui investasi asing atau mendorong dan mendukung perusahaan terpilih untuk terjun dalam investasi asing atau bisnis transnasional. *Go out policy* menawarkan keuntungan-keuntungan investasi lebih besar.

Dalam hal ini diantara negara-negara tersebut Kazakhstan merupakan negara yang menjadi target utama dalam pemenuhan minyaknya. Faktor geografis merupakan salah satu alasannya karena Tiongkok sendiri bersebelahan langsung dengan Kazakhstan. Meskipun terdapat beberapa negara produsen minyak di sekitar Tiongkok seperti Rusia, Turkmenistan, Uzbekistan, dan Kirgiztan, cadangan minyak di negara tersebut tidak sebanyak Kazakhstan.

Tiongkok berhasil menjalin kesepakatan-kesepakatan minyak jangka panjang dengan Kazakhstan. Strategi yang seringkali merugikan dan kurang berhasil memperoleh ekuitas melalui investasi langsung, kini dilengkapi dengan kebijakan model baru: *"Loan-for-oil"* kepada rezim pemerintahan yang sedang membutuhkan bantuan keuangan. Latar belakang kebutuhan finansial Kazakhstan telah diuraikan pada bagian awal. Krisis keuangan dan harga minyak yang jatuh memberi sinyal-sinyal urgensi perekonomian Kazakhstan. Celah ini yang dimanfaatkan oleh Tiongkok untuk menjalin dan memperdalam kemitraan energi dengan Kazakhstan utamanya di sektor perminyakan. Dengan ini, pemerintah Tiongkok sekaligus membuka peluang baru

bagi perusahaan minyak nasional dan perusahaan minyak domestik. Kebijakan dalam *"Transnational Oil Pipelines"* berperan untuk mengoptimalisasikan transfer energi ke Tiongkok utamanya ke kilang minyak Tiongkok Berdasarkan konteks keamanan energi, *transnational oil pipelines* berfungsi untuk meneguhkan posisi Tiongkok sebagai aktor energi utama di Asia Tengah. Ketiga kebijakan energi Tiongkok menjadi inti kebijakan luar negeri Tiongkok untuk menjamin suplai energi mendatang. Kebijakan energi Tiongkok melalui CNPC ini berjalan semakin intensif seiring dengan peningkatan kualitas kemitraan strategis Tiongkok – Kazakhstan. Kemitraan strategis ini menciptakan *win-win situation* bagi kedua pihak. Kemitraan strategis Tiongkok membantu Kazakhstan dalam politik dan perekonomian.

B. Saran

1. Untuk Pemerintah Tiongkok, Upaya negara untuk mendapat suplai minyak dari luar negeri merupakan langkah yang bagus untuk kebutuhan energi dalam jangka panjang, akan tetapi Tiongkok harus mengeluarkan program penghematan energi agar tidak selalu bergantung kepada negara lain, Dan pemerintah Tiongkok Harus berupaya meningkatkan kekuatan militer di negaranya karena, terdapat ancaman keamanan nasional jika proses stabilitas penyuplaian energi minyak terganggu.
2. Untuk Pemerintah Kazakhstan, lebih tegas terhadap pemodal-pemodal asing yang melakukan investasi dan akuisisi di kilang minyak milik Kazakhstan Karena suplai energi minyak merupakan sektor yang mempengaruhi hajat masyarakat banyak dan jika terjadi kesalahan dapat merugikan Negara.
3. Untuk peneliti lain, yang hendak melakukan penelitian yang sama dengan menggunakan objek penelitian yang sama diharapkan dapat menyajikan data dan memberikan analisa yang lebih akurat. Selain itu peneliti lainnya diharapkan dapat melakukan kajiannya dari permasalahan dan sudut pandang yang berbeda atau menggunakan variabel penelitian yang berbeda, sehingga, nantinya, akan memperluas khasanah pengetahuan bagi si peneliti dan pembaca. Peneliti juga menyadari, bahwa, dalam pembahasan penelitian ini sumber-sumber dan referensi yang terkait secara langsung dengan objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini masih sangat kurang. Oleh karena itu, diharapkan bagi yang hendak melakukan penelitian menggunakan objek dan variabel penelitian yang sama agar lebih memperbanyak lagi sumber-sumber dan referensi yang akurat terkait dengan permasalahan yang diangkat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Agung Anak B.P & M.Y Yanyan. 2005. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Dharmaputra, Rizal. 2009. *Manajemen Perbatasan dan Reformasi Sektor Keamanan.* Jakarta: IDSPS Press.

Fadillah, Muhammad. I. 2005. *Prospek Hubungan Bilateral Indonesia dan Amerika: Membangun Saling Pengertian*. Pusat Kajian Administrasi Internasional. Lembaga Administrasi Nasional Jakarta.

Hamayoun, Khan 2010, International Review 'China's Energy Drive and Diplomacy' International Busisnes Publication, 2007, China Oil, Gas Sector Business and Investment Opportunities Yearbook Volume 1, USA – China

L. Hughes & D. Shupe. 2010. *Creating Energy Security Indexes with Decision Matrices and Quantitaive Criteria*, Dalhousie University: Halifax.

May Rudi, Teuku. 1993. *Teori, Etika, dan kebijakan Hubungan Internasional*, Bandung: Angkasa.

_____. 2002. *Study Strategis dalam Transformasi Pasca Perang Dingin*, Bandung: PT Refika Aditama.

_____. 2003. *Administrasi dan Organisasi Internasional*. Bandung: Refika Aditama

Mingst, Karen. 2003. *Essentials of International Relationship*. New York: W. W. Norton and Company.

M. Parvizi Amineh, 2012. *Secure Oil and Alternative Energy: The Geopolitics of Energy Paths of China*, leiden- Boston

Oodgard, Ole & Delman, Jorgen. 2014. *China's Energy Security and Its Challenges Toward 2035, Energy Policy*. Denmark: Department of Cross Cultural and Regional Studies, Copenhagen University.

Peter Nolan, 2001. China and the Global Business Revolution: 440-461

Robert, Jackson dan Sorenson, George. 2005. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Rana, Kishan, S. 2002. *Bilateral Diplomacy*. New Delhi: Manas Publications.

Tonnesson, Stein dan Ashild Kolas, 2006,'Energy Security in Asia, China, India, Oil and Peace', International Peace Research Institute, Oslo

William D Coplin, 2003. *Pengantar Politik Internasional Suara Telaah Teoritis*, (terj). Bandung: Sinar baru.

Xu Yi-chong. 2007. *China's Energy Security.* London: Routledge.

Ystein Tunsj. 2013. Security and Profit in China's Energy Policy: Hedging Against Risk. Columbia university press

B. Jurnal Dan Karya Ilmiah

Clarke, Ryan. 2010. Chinese Energy Security: The Myth Of The Plan's Frontline Status. *jurnal strategic studies institute*.

Daojiong, Zha. 2006. China's Energy Security: Domestic and International Issues', Center for International Energy Security, Survival Vol. 48. No. 1: 179-190.

D. Yergin. 1988. Energy Security in the 1990s. *Foreign Affairs* 1: 111.

Djelantik, Sukawarsini. 2008. Kerjasama Internasional memerangi Korupsi (International Cooperation to Combat Corruption). *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional, Parahyangan Centre for International Studies* 4:2.

Heru Susetyo. 2008. Menuju Paradigma Keamanan Komprehensif Bersperspektif Keamanan Manusia dalam Kebijakan Keamanan Nasional Indonesia. *Lex Jurnalica* 6, No.1.

Safril, Ahmad. 2011. Ancaman krisis energi di balik kebangkitan china. *Jurnal Global Strategis* 2:169-184.

Zhao, Suisheng. 2008. China's Global Search for Energy Security: Cooperation and Competition in the Asia-Pacific. *Journal of Contemporary China* 55: 207-227.